

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, yang selanjutnya disebut LPTK, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggungjawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). LPTK memiliki tugas melakukan perekayasaan teknologi kelautan dalam rangka mendukung visi BPPSDM KP, yakni sebagai Inovator IPTEK dan Motlator Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.

A.1.2 Visi dan Tujuan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Dalam melaksanakan tugasnya Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) mempunyai visi, yaitu “Menjadi Inovator IPTEK Bidang Konservasi dan Pengawasan Untuk Pengelolaan Sumberdaya Kelautan yang Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan menjalankan misi yaitu:

- (a). Menguasai iptek kelautan untuk konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (b). Menghasilkan iptek kelautan untuk konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan;
- (c). Menerapkan, memanfaatkan dan menyebarkan iptek hasil litbang untuk kepentingan masyarakat.

A.1.3. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 85/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, LPTK dibantu oleh unit kerja dibawahnya yang terdiri dari:

- a. Urusan Umum;
- b. Koordinator;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan memerlukan peran dan dukungan SDM yang memadai sehingga inovasi yang dihasilkan berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat pengguna, karena kualitas SDM berperan besar dalam menentukan sukses atau tidaknya hasil riset yang diperoleh, selain penataan organisasi, anggaran dan fasilitas riset yang dimiliki.

Jumlah Pegawai LPTK sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dengan tingkat pendidikan dan disiplin ilmu yang beragam, terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf pelaksana. Jumlah pegawai LPTK yang berstatus Aparatur Sipil Negara sebanyak 11 (sebelas) orang, sedangkan 10 (sepuluh) orang merupakan Pegawai Kontrak serta 11 (sebelas) orang PJLP dengan latar belakang pendidikan dan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma dan Sarjana.

A.1.4. Kerjasama dengan Instansi Lain

LPTK telah melakukan inisiasi kerjasama ke beberapa instansi, baik instansi pemerintah, maupun universitas antara lain Dinas Komunikasi Informasi Data Statistik dan Persandian Kab. Wakatobi, Balai Taman Nasional Wakatobi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan Universitas Halu Oleo.

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

-
- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.344.000	3.344.000
Jumlah Pendapatan	3.344.000	3.344.000
Belanja		
Belanja Pegawai	1.313.513.000	1.273.513.000
Belanja Barang	3.210.000.000	3.210.000.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	4.523.513.000	4.483.513.000

Realisasi Pendapatan
Rp214.817.813

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp214.817.813 atau mencapai 6.423,98 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.344.000. Pendapatan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp214.817.813. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya Sewa Rumah dinas, pengembalian belanja tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), Jasa atas penjualan WakatobiAIS serta Penjualan atas hasil lelang kapal Mantalinga dan Longa dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.344.000	214.817.813	6.423,98
Jumlah	3.344.000	214.817.813	6.423,98

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 1.623,48 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	214.817.813	12.464.198	1.623,48
Jumlah	214.817.813	12.464.198	1.623,48

Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp214.817.813

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp214.817.813 dan Rp12.464.198. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 1.623,48 dari TA 2023 berupa: adanya Sewa Rumah dinas dari bulan Januari s/d Desember 2024 senilai Rp3.953.872,- , pengembalian belanja tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp1.113.941,- jasa atas penjualan WakatobiAIS senilai Rp17.000.000,- serta Penjualan atas hasil lelang kapal Mantalinga dan Longa senilai Rp192.750.000,- dengan nomor NTPN terlampir. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	214.817.813	12.464.198	1.623,48
Jumlah	214.817.813	12.464.198	1.623,48

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.953.872	4.270.782	(7,42)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.113.941	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	547.641	(100,00)
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	17.000.000	7.645.775	122,35
Jumlah	214.817.813	12.464.198	1.623,48

Realisasi Belanja
Rp4.226.223.522

B.2 Belanja

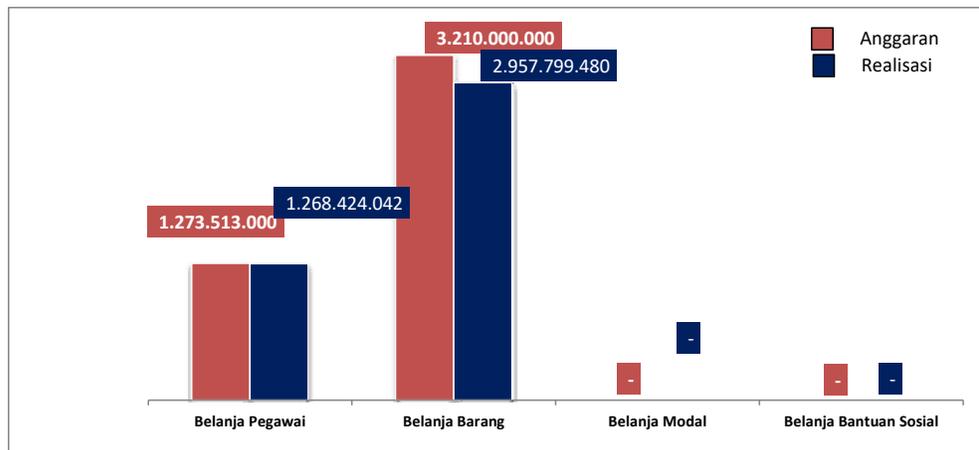
Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp4.226.223.522 atau 94,26 % dari anggaran belanja sebesar Rp.4.483.513.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	1.273.513.000	1.268.424.042	99,60
Belanja Barang	3.210.000.000	2.957.799.480	92,14
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	4.483.513.000	4.226.223.522	94,26

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 2,47% disebabkan antara lain kenaikan belanja pegawai sebesar 10,08 persen, dan penurunan belanja barang sebesar 7,02 persen. Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	1.268.424.042	1.152.325.957	10,08
Belanja Barang	2.957.799.480	3.180.964.768	(7,02)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	4.226.223.522	4.333.290.725	(2,47)

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp1.268.424.042

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.268.424.042 dan Rp1.152.325.957. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 10,08 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan ASN yang berasal dari pemerintah Daerah ke Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan pada bulan Juli 2024 sebanyak 1 PNS dan pada bulan Agustus 2024 terjadi mutasi kurang/pindah pegawai dari Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) ke Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan (AKKP) wakatobi. dan di bulan Agustus terdapat Penambahan 2 pegawai yang berasal dari Pemda.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	432.127.200	418.433.600	3,27
Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.005	6.913	(13,13)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	22.518.670	24.246.940	(7,13)
Belanja Tunj. Anak PNS	7.826.320	8.369.168	(6,49)
Belanja Tunj. Struktural PNS	5.040.000	10.980.000	(54,10)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	4.900.000	9.700.000	(49,48)
Belanja Tunj. PPh PNS	2.560.704	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	19.698.240	21.726.000	(9,33)
Belanja Uang Makan PNS	56.113.000	60.976.000	(7,98)
Belanja Tunjangan Umum PNS	14.985.000	13.225.000	13,31
Belanja Uang Lembur	12.267.000	26.604.000	(53,89)
Belanja Uang Lembur PPPK	1.085.000	454.000	138,99
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	1.269.164.295	1.152.325.957	10,14
Pengembalian Belanja Pegawai	740.253	-	-
Jumlah Belanja	1.268.424.042	1.152.325.957	10,08

Realisasi Belanja
Barang
Rp2.957.799.480

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.957.799.480 dan Rp3.180.964.768. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 7,02% dari Realisasi TA 2023.

Hal ini antara lain disebabkan oleh penurunan belanja barang dikarenakan :

- 1). Pembayaran belanja Listrik sering berubah ubah tidak sesuai dengan Anggaran 2024.
- 2). Kontrak pengadaan untuk pemeliharaan lebih kecil dari Anggaran 2024
- 3). Perhitungan pembayaran belanja barang berupa gaji PPNPN, PJLP tidak sesuai dengan target realisasi serta kurangnya kegiatan lembur PPNPN yang dilaksanakan.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	1.014.118.161	1.107.797.370	(8,46)
Belanja Barang Non Operasional	26.189.670	49.670.355	(47,27)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	62.193.294	65.713.611	(5,36)
Belanja Jasa	99.735.016	147.600.895	(32,43)
Belanja Pemeliharaan	1.501.229.868	1.472.666.389	1,94
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	254.333.471	338.295.148	(24,82)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.957.799.480	3.181.743.768	(7,04)
Pengembalian Belanja	-	779.000	(100,00)
Jumlah Belanja	2.957.799.480	3.180.964.768	(7,02)

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2024

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Realisasi Belanja Modal
Rp0*

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Uang Tunai di Brankas	-	-
Uang di Rekening Bank BNI	-	-
Pajak	-	-
Kuitansi UP yang belum di SPM kan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp1.095.000. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Lainnya	-	1.095.000
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	1.095.000

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak Rp0

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp5.475. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	#VALUE!
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		#VALUE!

Persediaan
Rp4.303.000

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.303.000 dan Rp5.200.500. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Barang Konsumsi	3.767.000	4.912.500
Bahan untuk Pemeliharaan	536.000	288.000
Jumlah	4.303.000	5.200.500

Persediaan tersebut di atas dalam Semua Jenis Persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik

Tanah Rp1.815.296.000

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.815.296.000 dan Rp1.815.296.000. Nilai Tanah tersebut Tidak ada penambahan nilai pada aset tanah. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	1.815.296.000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	1.815.296.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2024

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	7.772 M2	Jl Ir. Soekarno KM.18 Wangi-Wangi	1.141.212.000
2	1.367 M2	Jl. Utudae Samad Kel. Mandati III	276.681.000
3	3.364 M2	Jl. Utudae Samad Kel. Mandati III	397.403.000
4	-	-	-
Jumlah			1.815.296.000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

tidak ada tanah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak ketiga.

Peralatan dan Mesin
Rp30.214.949.868

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp30.214.949.868 dan Rp34.447.644.408. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	34.447.644.408
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	4.232.694.540
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	30.214.949.868
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(18.899.921.265)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	11.315.028.603

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- a. Tidak ada perubahan nilai pada aset peralatan dan mesin

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- berdasarkan nomor surat B.310/LPTK/KP.450/VIII/2024 tentang berita acara penelitian/penilaian BMN dalam rangka penghapusan dengan uraian barang sebagai berikut :
 - 1). Speed Boat / Motor Tempel senilai Rp.1.757.544.560,-
 - 2). Cold Storage (Kamar Pendingin) senilai Rp.78.455.000,-
 - 3). Jetfoil senilai Rp.2.396.694.980,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp6.209.013.888

C.7 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.209.013.888 dan Rp6.209.013.888. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	6.209.013.888
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	6.209.013.888
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(766.617.970)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	5.442.395.918

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada perubahan nilai pada aset gedung dan bangunan

-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada perubahan nilai pada aset gedung dan bangunan

-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp5.056.367.806*

C.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.5.056.367.806 dan Rp.5.056.367.806. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	5.056.367.806
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	5.056.367.806
Akumulasi Penyusutan s.d.	(1.337.608.163)
Nilai Buku per	3.718.759.643

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada perubahan nilai pada aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

-

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada perubahan nilai pada aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap Lainnya
Rp45.968.610*

C.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.45.968.610 dan Rp.45.968.610. Aset tetap tersebut Tidak ada perubahan nilai pada aset tetap lainnya. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	45.968.610
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2024	45.968.610
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	45.968.610

Mutasi tambah/kurang:

Tidak ada perubahan nilai pada aset tetap lainnya

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp21.004.147.398*

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp21.004.147.398 dan Rp22.980.930.345. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	30.214.949.868	(18.899.921.265)	11.315.028.603
2	Gedung dan Bangunan	6.209.013.888	(766.617.970)	5.442.395.918
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.056.367.806	(1.337.608.163)	3.718.759.643
4	Aset Tetap Lainnya	45.968.610	-	45.968.610
Akumulasi Penyusutan		41.526.300.172	(21.004.147.398)	20.522.152.774

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

*Aset Tak Berwujud
Rp111.410.000*

C.11 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp111.410.000 dan Rp111.410.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Loka Perekrutanan Teknologi Kelautan berupa Software yang terdiri dari :

- 1). Ott Sof Hidras 3 senilai Rp.46,634,000,-,
- 2). Website LPTK senilai Rp. 26,000,000,-,
- 3). Ecdis Kernel senilai Rp.38,776,000,-.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2024	111.410.000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	111.410.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	111.410.000

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- a. tidak ada perubahan nilai Aset Tak Berwujud

C.12 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp1.185.209.619 dan Rp242.432.699. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2024	242.432.699
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	4.232.694.540
	-
Mutasi Kurang:	
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	3.289.917.618
Saldo per 31 Desember 2024	1.185.209.621
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	(1.179.822.789)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	5.386.832

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

- berdasarkan nomor surat B.310/LPTK/KP.450/VIII/2024 tentang berita acara penelitian/penilaian BMN dalam rangka penghapusan dengan uraian barang sebagai berikut :
 - 1). Speed Boat / Motor Tempel senilai Rp.1.757.544.560,-
 - 2). Cold Storage (Kamar Pendingin) senilai Rp.78.455.000,-
 - 3). Jetfoil senilai Rp.2.396.694.980,-

Mutasi Kurang

- berdasarkan surat Kementerian Keuangan RI nomor: S-106/MK.6/KNL.1505/2024 tanggal 01 November 2024 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. Penjualan berupa Alat Angkutan Apung Bermotor Kapal speed boat dan senilai Rp893.222.640 terjual senilai Rp7.750.000,00, Jet foil senilai Rp2.396.694.980,00 terjual senilai Rp185.000.000,00, dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan seluruhnya disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp1.179.822.789 dan Rp231.089.902. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	111.410.000	-	111.410.000
Aset Lain-lain	1.185.209.619	(1.179.822.789)	5.386.830
-	-	-	-
Total	1.296.619.619	(1.179.822.789)	116.796.830

Utang kepada Pihak Ketiga Rp5.832.590

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.832.590 dan Rp8.791.669. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	5.832.590	8.791.669
	-	-
Total	5.832.590	8.791.669

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

berasal dari beban barang yang masih harus di bayar berupa Tagihan Listrik bulan Desember 2024 dengan nomor tagihan AGA.04/UP3./2025/403820

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

C.15 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.16 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas Rp22.452.716.014

C.17 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp22.452.716.014. dan Rp24.713.611.520. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp20.953.872

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp20.953.872 dan Rp11.916.557. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 75,84. Hal tersebut disebabkan oleh Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan berasal dari setoran sewa rumah dinas (mess) dari bulan Januari s/d Desember 2024 senilai Rp3.953.872,-. pendapatan tersebut terdiri dari pemotongan langsung dari SPM senilai Rp1.721.466,- dan penyeteroran dengan menggunakan simponi senilai Rp2.232.406,- serta jasa penjualan WakatobiAIS 56 unit senilai Rp17.000.000,-. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.953.872	4.270.782,00	(7,42)
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan,	17.000.000	7.645.775,00	122,35
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	20.953.872,00	11.916.557,00	75,84

Beban Pegawai
Rp1.269.519.042

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.269.519.042 dan Rp1.151.230.957.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 10,27 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh karena adanya tambahan ASN yang berasal dari Pemerintah Daerah ke LPTK pada bulan Juli 2024 sebanyak 1 PNS.dan pada bulan Agustus 2024 terjadi mutasi kurang/pindah 1 pegawai dari Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) ke Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan (AKKP) wakatobi. dan pada bulan September terdapat penambahan 2 pegawai ASN. sehingga total ASN sebanyak 11 Pegawai. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	432.127.200	418.433.600	3,27
Beban Pembulatan Gaji PNS	5.752	6.913	(16,79)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	22.518.670	24.246.940	(7,13)
Beban Tunj. Anak PNS	7.826.320	8.369.168	(6,49)
Beban Tunj. Struktural PNS	5.040.000	10.980.000	(54,10)
Beban Tunj. Fungsional PNS	5.995.000	8.605.000	(30,33)
Beban Tunj. PPh PNS	2.560.704	-	-
Beban Tunj. Beras PNS	19.698.240	21.726.000	(9,33)
Beban Uang Makan PNS	56.113.000	60.976.000	(7,98)
Beban Tunjangan Umum PNS	14.245.000	13.225.000	7,71
Beban Uang Lembur	12.267.000	26.604.000	(53,89)
Beban Uang Lembur PPPK	1.085.000	454.000	138,99
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	556.835.984	510.243.681	9,13
Beban Gaji Pokok PPPK	44.850.400	14.832.500	202,38
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.192	465	156,34
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	4.485.040	1.483.250	202,38
Beban Tunj. Fungsional PPPK	7.560.000	2.700.000	180,00
Beban Tunj. Beras PPPK	2.027.760	724.200	180,00
Beban Uang Makan PPPK	8.103.000	3.515.000	130,53
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan PPPK	66.173.780	24.105.240	174,52
Jumlah	1.269.519.042	1.151.230.957	10,27

Beban Persediaan
Rp45.708.294

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp45.708.294 dan Rp43.980.135

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,93 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Penambahan beban persediaan disebabkan karena penambahan pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan konsumsi	45.708.294	43.900.135	4,12
Beban Persediaan bahan baku	-	80.000	(100,00)
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	45.708.294,00	43.980.135	3,93

Beban Barang dan Jasa
Rp1.137.083.768

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.137.083.768 dan Rp1.305.899.690.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 12,93 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh penurunan beban keperluan perkantoran berupa pengadaan PJLP, pengurangan beban honor operasional satker disesuaikan dengan SBM, kenaikan beban barang operasional lainnya dikarenakan adanya kegiatan makan Bergizi, penurunan beban bahan dikarekan berkurangnya kegiatan non operasional yang dilaksanakan, penurunan beban peralatan dan mesin ekstrakomtabel berupa perlengkapan keperluan kantor dan penurunan beban langganan listrik disebabkan kurangnya aktivitas pelayanan, penurunan beban sewa disebabkan anggaran yang disediakan hanya untuk sewa hanggar kapal. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	949.325.661	1.005.707.400	(5,61)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	596.500	706.500	(15,57)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	36.696.000	85.880.000	(57,27)
Beban Barang Operasional Lainnya	27.500.000	13.888.000	98,01
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi	-	1.615.470	(100,00)
Beban Bahan	2.860.000	16.208.799	(82,36)
Beban Honor Output Kegiatan	3.400.000	8.160.000	(58,33)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	19.929.670	25.301.556	(21,23)
Beban Langganan Listrik	90.775.937	102.431.965	(11,38)
Beban Sewa	6.000.000	46.000.000	(86,96)
Jumlah	1.137.083.768	1.305.899.690,00	(12,93)

Beban Pemeliharaan
Rp1.518.612.368

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.518.612.368 dan Rp1.490.198.365.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,91 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya penambahan anggaran untuk perbaikan toilet dan interior gedung kantor. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	757.545.563	1.225.167.933	(38,17)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	743.684.305	247.498.456	200,48
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	17.382.500	17.531.976	(0,85)
	-	-	-
Jumlah	1.518.612.368	1.490.198.365	1,91

Beban Perjalanan Dinas
Rp254.333.471

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp254.333.471 dan Rp337.516.148

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 24,65 persen disebabkan oleh penurunn beban perjalanan dinas disebabkan oleh kurangnya kegiatan non operasional yang dilaksanakan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	246.233.471	322.816.148	(23,72)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.100.000	14.700.000	(44,90)
	-	-	-
Jumlah	254.333.471,00	337.516.148	(24,65)

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp2.261.867.560

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.261.867.560 dan Rp2.497.822.888.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.975.636.244	2.209.513.339	(10,59)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	140.176.080	140.176.080	-
Beban Penyusutan Irigasi	13.584.819	13.584.819	-
Beban Penyusutan Jaringan	126.514.450	126.514.450	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digu	5.955.967	8.034.200	(25,87)
	-	-	-
Jumlah Penyusutan	2.261.867.560	2.497.822.888	(9,45)
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	2.261.867.560	2.497.822.888	(9,45)

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih Rp-
5.475

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-5.475 dan Rp5.475

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyisihan Piutang PNBPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(5.475)	5.475	(200,00)
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	2024	2023	0,05
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
	2024	2023	0,05
	-	-	-
Jumlah	(5.475)	5.475	(200)

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan jurnal balik tahun 2023

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp1.113.941

D.10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.113.941 dan Rp547.641.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.113.941	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	547.641,00	(100,00)
Jumlah	1.113.941,00	547.641	103,41

Pos Luar Biasa Rp0

D.11 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan PNPB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	1.615.470	(100,00)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	1.615.470	(100,00)

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp24.713.611.520,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.24.713.611.520,00 dan Rp.27.206.974.453,00

Defisit LO
Rp.6.272.301.215,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.6.272.301.215,00 dan Rp.6.814.189.460,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2024

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Koreksi ini

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp4.011.405.709

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.4.011.405.709 dan Rp.4.320.826.527. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.226.223.522
Diterima dari Entitas Lain	(214.817.813)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	4.011.405.709

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp 4.226.223.522, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 214.817.813

Ekuitas Akhir Rp22.452.716.014

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.22.452.716.014,00 dan Rp.24.713.611.520,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

- 1). Sisa kelebihan pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2023 senilai Rp.18,941,- telah disetor ke kas Negara bulan Januari 2024 dengan bukti NTPN nomor: AC2DB6U8EU4VH1K9 tanggal 12 Januari 2024.
- 2). Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional tugas belajar atas temuan BPK dan telah disetor ke kas Negara bulan April 2024 dengan bukti NTPN nomor: 8151D3CIFK4HJ82O tanggal 18 April 2024,
- 3). serta Tagihan listrik Desember 2024 dengan tagihan nomor: AGA.04/UP3./2025/403820.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 pada Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dijelaskan terlampir pada Laporan Keuangan ini.

berdasarkan surat Kementerian Keuangan nomor: S-106/MK.6/KNL.1505/2024 tanggal 01 November 2024 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.Penjualan berupa Alat Angkutan Apung Bermotor Kapal speed boat dan senilai Rp893.222.640 terjual senilai Rp7.750.000,00, Jet foil senilai Rp2.396.694.980,00 terjual senilai Rp185.000.000,00, namun 1 item speed boat senilai Rp864.321.920,00 belum terjual/ mengalami gagal lelang. kegiatan lelang tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan seluruhnya disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	I
LAMPIRAN	II
LAMPIRAN	III
LAMPIRAN	IV
LAMPIRAN	V